ISSN: 2614-6754 (print)
ISSN: 2614-3097(online)

Halaman 50957-50963
Volume 8 Nomor 3 Tahun 2024

Transformasi Jakarta sebagai Pusat Perekonomian Nasional yang Memperngaruhi Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia

S. Sofyan[1], D.F. Sukma[2], S. Khofifah[3], W. Berliany[4], F. Siswajayanti[5]
[1,2,3,4,5] Ilmu Hukum, Universitas Pakuan Bogor
e-mail: Farahdhinny@unpak.ac.id[1], 010122004@student.unpak.ac.id[2], 010122005@student.unpak.ac.id[3], 010122026@student.unpak.ac.id[3], 010122068@student.unpak.ac.id[4]

Abstrak

Jakarta telah berkembang menjadi pusat perekonomian nasional, menyumbang 16,77% terhadap PDB Indonesia pada tahun 2023. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pemerintah terkait pembangunan infrastruktur, pertumbuhan sektor industri, dan tantangan urbanisasi yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi Jakarta. Penelitian menggunakan metode deskriptif dengan analisis data sekunder dari laporan resmi dan sumber relevan. Hasil menunjukkan bahwa investasi besar pada infrastruktur, seperti MRT dan LRT, meningkatkan konektivitas dan memperkuat sektor jasa sebagai penggerak utama ekonomi. Namun, tantangan seperti ketimpangan sosial, kemacetan, dan tekanan lingkungan masih menjadi isu utama. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kolaborasi lintas sektor diperlukan untuk mendukung pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Kata kunci: *Infrastruktur, Sektor Jasa, Urbanisasi, Ketimpangan Sosial, Ekonomi*

Abstract

Jakarta has emerged as a national economic hub, contributing 16.77% to Indonesia's GDP in 2023. This study aimed to analyze government policies on infrastructure development, industrial growth, and urbanization challenges affecting Jakarta's economic expansion. A descriptive method was employed using secondary data from official reports and relevant sources. The findings reveal that significant investments in infrastructure, such as MRT and LRT, improved connectivity and strengthened the service sector as the primary economic driver. However, challenges like social inequality, traffic congestion, and environmental pressures remain critical issues. This study concludes that cross-sectoral collaboration is essential to support more inclusive and sustainable development.

Keywords : *Infrastructure, Service Sector, Urbanization, Social Inequality, Economy*

PENDAHULUAN

Jakarta, sebagai ibu kota Indonesia, memegang peran yang sangat vital dalam perekonomian nasional. Dengan jumlah penduduk yang padat dan beragam, Jakarta tidak hanya berfungsi sebagai pusat pemerintahan, tetapi juga sebagai pusat bisnis dan perdagangan yang mempengaruhi perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Sebagai kota metropolitan, Jakarta menyumbang lebih dari 16% dari total PDB nasional dan menjadi rumah bagi banyak perusahaan multinasional serta sektor industri kreatif yang terus berkembang pesat. Meskipun memiliki potensi besar, Jakarta menghadapi berbagai tantangan serius, seperti kemacetan, polusi, dan ketimpangan sosial yang dapat menghambat pertumbuhan ekonominya. Oleh karena itu, transformasi Jakarta menjadi pusat perekonomian nasional yang lebih efisien dan berkelanjutan sangat penting, tidak hanya untuk kota itu sendiri, tetapi juga untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia secara keseluruhan.

Kajian literatur menunjukkan bahwa peran kota besar dalam perekonomian nasional sangat signifikan. Uwuigbe dan Ajibolade (2013) mengemukakan bahwa pusat-pusat ekonomi yang kuat dapat mendorong pertumbuhan ekonomi regional dan nasional melalui peningkatan investasi,

penciptaan lapangan kerja, serta pengembangan infrastruktur yang lebih baik. Wang (2016) juga menekankan bahwa desentralisasi fiskal dan pengelolaan anggaran yang baik di tingkat daerah dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengeluaran publik, yang pada akhirnya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Penelitian Muttakin et al. (2015) menunjukkan bahwa alokasi sumber daya yang tepat serta kebijakan yang kuat dari pemerintah pusat sangat penting untuk mendorong pertumbuhan sektor-sektor strategis di daerah.

Namun, meskipun banyak penelitian yang membahas peran kota besar dalam perekonomian, kajian yang secara spesifik mengeksplorasi transformasi Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia masih terbatas. Artikel ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan memberikan analisis mendalam mengenai pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan kebijakan pembangunan daerah yang dapat mempengaruhi kinerja ekonomi Jakarta. Pernyataan kebaruan ilmiah dari artikel ini terletak pada penggabungan analisis kinerja DAK dengan konteks transformasi Jakarta sebagai pusat perekonomian, serta dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi di tingkat nasional.

Permasalahan penelitian ini berfokus pada rendahnya kinerja realisasi DAK di sektor-sektor strategis, seperti pertanian dan kesehatan, yang dapat mempengaruhi transformasi Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional. Hipotesis yang diajukan adalah bahwa terdapat faktor-faktor tertentu yang mempengaruhi perbedaan kinerja realisasi DAK antara sektor-sektor tersebut, seperti kualitas pengelolaan anggaran, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta kapasitas sumber daya manusia yang terlibat dalam pelaksanaan program. Selain itu, tantangan urbanisasi dan infrastruktur yang tidak memadai juga diyakini turut berkontribusi pada rendahnya kinerja DAK di sektor pertanian, yang seharusnya dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kinerja realisasi DAK di DKI Jakarta, dengan fokus pada sektor pertanian dan kesehatan, serta bagaimana hal ini dapat mempengaruhi transformasi Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional. Selain menawarkan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan efektivitas penggunaan DAK dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Jakarta yang berkelanjutan, penelitian ini juga berupaya untuk menunjukkan dengan tepat variabel-variabel yang mempengaruhi disparitas kinerja antara kedua sektor tersebut. Untuk memaksimalkan kontribusi Jakarta terhadap perekonomian Indonesia, penelitian ini diyakini akan membantu terciptanya kebijakan publik yang lebih kuat dan kompetitif di tingkat regional dan nasional.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode desk study atau studi literatur untuk mengumpulkan data dan informasi dari berbagai sumber sekunder. Data diperoleh dari dokumen resmi, laporan tahunan, buku, jurnal ilmiah, artikel terkait, serta berita yang dapat diakses melalui internet. Sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), laporan kebijakan pemerintah, serta publikasi dari lembaga-lembaga penelitian ekonomi. Selain itu, artikel-artikel jurnal yang relevan mengenai ekonomi daerah dan pembangunan infrastruktur juga digunakan untuk memperkaya pemahaman tentang topik ini.

Proses pengumpulan data dilakukan dengan menelusuri dan mengakses sumber-sumber terpercaya yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi Jakarta, pembangunan infrastruktur, dan urbanisasi. Dokumen-dokumen yang diperoleh kemudian dianalisis untuk mendapatkan informasi yang relevan terkait dampak Jakarta sebagai pusat perekonomian terhadap perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Data yang dikumpulkan difokuskan pada variabel-variabel yang memengaruhi perekonomian, seperti jumlah penduduk, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan faktor-faktor lainnya yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif untuk menggambarkan hubungan antara Jakarta sebagai pusat perekonomian dengan perkembangan ekonomi di Indonesia. Selain itu, pendekatan komparatif juga digunakan untuk membandingkan data antara Jakarta dan wilayah sekitarnya, serta antara sektor-sektor ekonomi yang ada di

wilayah tersebut. Temuan analisis ini diharapkan dapat memberikan pencerahan lebih lanjut mengenai bagaimana transisi Jakarta berdampak terhadap ekspansi ekonomi Indonesia serta prospek dan kesulitan dalam mencapai pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Pemerintah terhadap Pembangunan Infrastruktur di Jakarta

Jakarta, sebagai ibu kota Republik Indonesia, telah mengalami transformasi yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir, menjadikannya sebagai pusat perekonomian nasional. Pertumbuhan ekonomi Jakarta yang rata-rata mencapai 6% per tahun menunjukkan bahwa kota ini terus berkembang meskipun menghadapi berbagai tantangan, seperti kemacetan, masalah lingkungan, dan ketimpangan sosial. Menurut Badan Pusat Statistik (2023), Jakarta menyumbang sekitar 17% dari total Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, menjadikannya sebagai motor penggerak utama perekonomian nasional. Dalam konteks ini, penting untuk memahami faktor-faktor yang mendorong transformasi Jakarta dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi di seluruh Indonesia.

Salah satu faktor utama yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi Jakarta adalah kebijakan pemerintah yang mendukung pengembangan infrastruktur. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah telah meluncurkan berbagai program pembangunan, termasuk proyek infrastruktur transportasi yang ambisius. Pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) dan Light Rail Transit (LRT) adalah contoh nyata dari upaya ini. Proyek-proyek ini tidak hanya meningkatkan konektivitas antar wilayah di Jakarta, tetapi juga mengurangi kemacetan yang selama ini menjadi masalah utama di kota ini. Laporan dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (2022) menunjukkan bahwa investasi infrastruktur ini tidak hanya mempercepat mobilitas warga, tetapi juga menarik investasi dari sektor swasta dan asing, yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan ekonomi.

Perkembangan Kota Jakarta dan wilayah sekitarnya dapat dilihat dari perubahan yang terjadi antara tahun 1972 hingga 2012. Warna merah pada peta menunjukkan lahan yang telah dibangun, seperti kawasan perumahan dan komersial. Meskipun tidak banyak lahan terbangun pada tahun 1972, lahan tersebut berkembang dengan cepat hingga hampir memenuhi wilayah DKI Jakarta pada tahun 2012. Akibat pertumbuhan tersebut, pembangunan kota ini kini semakin meluas ke wilayah sekitar DKI Jakarta, sehingga menciptakan satelit-satelit. kota atau aglomerasi. Kota Tanggerang, Kabupaten Tanggerang, Kota Depok, Kota Bogor, Kota Bekasi, Kota Tangsel, dan Kabupaten Bekasi semuanya ada di Jakarta.

Harga lahan perumahan di Jakarta meningkat seiring dengan pertumbuhan populasi kota dan urbanisasi.. Hal ini mendorong penduduk untuk memilih tinggal lebih jauh dari tempat kerja mereka, yang sebagian besar terletak di Jakarta. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah daerah DKI Jakarta menawarkan solusi berupa pembangunan transportasi massal, seperti Kereta Rel Listrik (KRL) yang melayani wilayah Jabodetabek, dan bus antar kota yang terhubung dengan Trans Jakarta. Sebenarnya pemerintah Hindia Belanda mulai membangun jalur kereta listrik pada tahun 1923 dan selesai pada tanggal 24 Desember 1924 antara Tanjung Priok dan Meester Cornelis (Jatinegara) (krl.co.id, 2018). Dengan bantuan subsidi pemerintah untuk biaya angkutan massal, biaya perjalanan yang murah memungkinkan penduduk dan karyawan untuk tinggal cukup jauh dari tempat kerja, pertemuan sosial, dan tempat kerja.

ISSN: 2614-6754 (print)
ISSN: 2614-3097(online)

Halaman 50957-50963
Volume 8 Nomor 3 Tahun 2024

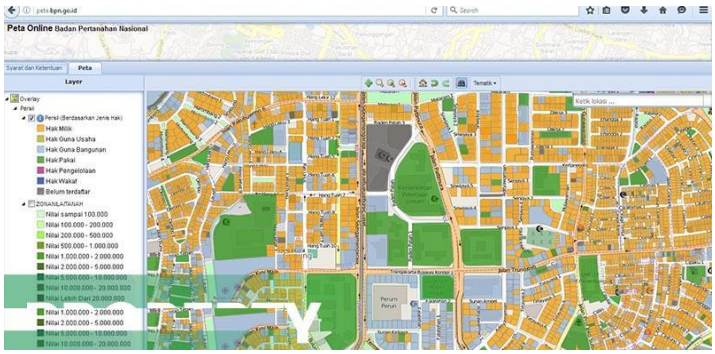

Gambar 1. Peta Rentang harga lahan di Jakarta dan sekitarnya
Sumber: http://peta.bpn.go.id/ diakses 15 Desember 2024

Tabel 1. Persentase kenaikan harga tanah berdasarkan area

Area	2010-2011	2011-2012	2012-2013	2013-2014	Rata-rata
Jakarta	18,21 %	21,01 %	14,65 %	10,85 %	16,18 %
Tangerang	28,57 %	22,22 %	63,64 %	27,78 %	35,55 %
Tangerang Selatan	16,38 %	18,52 %	25,10 %	22,00 %	20,47 %
Bekasi	28,57 %	22,33 %	49,10 %	19,34 %	30,08 %
Depok	32,00 %	51,52 %	25,00 %	40,00 %	37,13 %

Sumber: Bank Indonesia, 2015 dalam Elmanisa et al, 2017

Pertumbuhan sektor industri dan jasa pada struktur PDB masing-masing kota menunjukkan bagaimana aktivitas perekonomian mempengaruhi perubahan penggunaan lahan di sekitar DKI Jakarta. Sektor kedua ini merupakan metrik penting untuk menentukan seberapa besar pengaruh suatu wilayah terhadap pertumbuhan fisik kota. Berikut gambaran kontribusi industri manufaktur dan jasa berdasarkan data PDRB masing-masing kota dan kabupaten sekitar Jakarta:

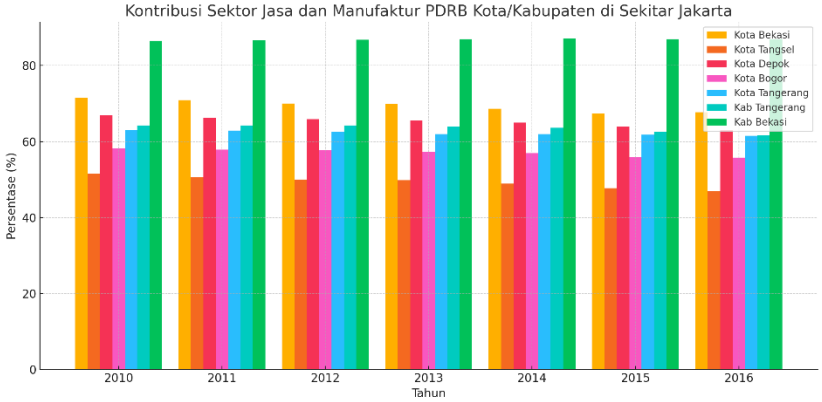

Gambar 2. Data Kontribusi Gabungan Sektor Jasa Dan Manufaktur Dalam PDRB Di Kota Sekitar Jakarta
Sumber: Kota Dalam Angka,2016

Terlihat dari grafik terlampir bahwa sektor industri dan manufaktur memberikan kontribusi lebih dari 50% untuk setiap kota dan kabupaten. Dengan kata lain, sektor manufaktur dan jasa menyumbang porsi yang lebih besar terhadap PDB. Hal ini menunjukkan adanya perubahan signifikan pada struktur perekonomian masing-masing daerah. Tingginya angka tersebut juga mencerminkan kekuatan ekonomi kota yang cukup solid. Secara khusus, Kabupaten Bekasi mencatat kontribusi lebih dari 80%, yang disebabkan oleh semakin banyaknya kawasan industri manufaktur yang berkembang di wilayah tersebut.

Selain infrastruktur, perkembangan sektor industri di Jakarta juga menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Jakarta telah menjadi pusat bagi berbagai industri, termasuk teknologi informasi, manufaktur, dan jasa keuangan. Data dari World Bank (2023) menunjukkan bahwa sektor jasa menyumbang lebih dari 60% dari total PDB Jakarta. Pertumbuhan sektor ini didorong oleh meningkatnya permintaan akan layanan digital dan keuangan, terutama di era digital saat ini. Banyak perusahaan teknologi dan startup bermunculan di Jakarta, menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Fenomena ini menunjukkan bahwa Jakarta tidak hanya berfungsi sebagai pusat pemerintahan, tetapi juga sebagai pusat inovasi dan bisnis. Namun, transformasi ekonomi Jakarta tidak lepas dari dampak sosial dan lingkungan yang signifikan. Urbanisasi yang cepat menyebabkan peningkatan jumlah penduduk yang signifikan, yang pada gilirannya menambah tekanan pada infrastruktur dan layanan publik. Menurut penelitian oleh Koperasi, K. (2005), tantangan ini memerlukan perhatian serius dari pemerintah untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak mengorbankan kualitas hidup warga. Kemacetan lalu lintas, polusi udara, dan masalah perumahan adalah beberapa isu yang muncul sebagai akibat dari pertumbuhan yang pesat ini. Pemerintah perlu merumuskan kebijakan yang tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada keberlanjutan sosial dan lingkungan.

Ketimpangan sosial juga menjadi isu yang perlu diperhatikan. Meskipun Jakarta mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat, tidak semua warga merasakan manfaat dari pertumbuhan tersebut. Ada kesenjangan yang signifikan antara kelompok masyarakat yang kaya dan miskin. Meski akhir-akhir ini mengalami penurunan, angka kemiskinan di Jakarta masih sangat tinggi, menurut data Badan Pusat Statistik. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk menciptakan inisiatif yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat miskin.

Kerjasama pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat sipil sangat penting dalam mengatasi permasalahan ini. Pemangku kepentingan yang berbeda harus dilibatkan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan oleh pemerintah. Selain itu, pendidikan dan pelatihan harus ditingkatkan untuk menciptakan angkatan kerja yang mampu dan diperlengkapi untuk menangani permasalahan di seluruh dunia. Dengan demikian, Jakarta dapat mempertahankan perannya sebagai mesin utama perekonomian nasional tanpa mengorbankan taraf hidup warganya.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia sangat dipengaruhi oleh metamorfosis Jakarta sebagai pusat perekonomian negara. Elemen penting dalam proses ini mencakup pertumbuhan sektor industri, investasi infrastruktur berkelanjutan, dan kebijakan pemerintah yang mendukung. Namun, untuk menjamin pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan, permasalahan seperti lalu lintas, urbanisasi, dan kesenjangan sosial harus diselesaikan. Agar Jakarta dapat terus berperan sebagai katalis bagi perekonomian nasional dan memberikan manfaat yang adil bagi seluruh masyarakat, diperlukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengkaji alternatif-alternatif yang mungkin dilakukan.

Sinergi Pusat dan Daerah untuk Pengurangan Pengangguran dan Peningkatan Produktivitas DKI Jakarta

Kajian Fiskal Regional (KFR) Tahun 2023 yang diterbitkan oleh Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta memberikan analisis komprehensif mengenai dinamika ekonomi dan fiskal regional, serta isu-isu strategis dalam pembangunan daerah. Laporan ini menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk mengatasi berbagai tantangan pembangunan, seperti pengurangan pengangguran dan peningkatan produktivitas tenaga kerja yang berdaya saing.

Pada tahun 2023, perekonomian DKI Jakarta berhasil mencatat pertumbuhan sebesar 4,96% (c-to-c), didukung oleh konsumsi rumah tangga, investasi, serta sektor jasa yang meliputi informasi dan komunikasi, perdagangan, dan keuangan. Dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar Rp3.442,98 triliun (ADHB), Jakarta memberikan kontribusi sebesar 16,77% terhadap PDB nasional, mengukuhkan posisinya sebagai pusat ekonomi terkemuka di Indonesia. Ketimpangan ekonomi terlihat dari peningkatan Gini Ratio menjadi 0,431, menunjukkan adanya kesenjangan pendapatan yang cukup lebar di masyarakat. Tingkat kemiskinan mencapai 4,44%, sementara tingkat pengangguran terbuka berada di angka 6,53%. Urbanisasi yang cepat juga menambah tekanan pada infrastruktur, layanan publik, dan sumber daya yang terbatas.Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah merumuskan Rencana Pembangunan Daerah

(RPD) 2023–2026 dengan fokus pada regenerasi kota yang berkelanjutan, transformasi digital, dan perekonomian inklusif. Tantangan-tantangan seperti dampak sosial-ekonomi pandemi, urbanisasi, dan ketahanan pangan menjadi perhatian utama.

a. Kinerja Fiskal Daerah Surplus dan Optimalisasi Pendapatan
   KFR mencatat bahwa pengelolaan fiskal di DKI Jakarta menunjukkan kinerja yang positif, dengan realisasi pendapatan daerah mencapai Rp71,04 triliun atau 100,53% dari target. Pendapatan tersebut tumbuh sebesar 5,57% dibandingkan tahun sebelumnya, didukung oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Transfer, dan penerimaan pajak daerah. Pajak daerah tercatat sebagai kontributor utama dengan total penerimaan sebesar Rp43,52 triliun.
   Meskipun belanja daerah terealisasi sebesar 92,54% dari pagu, pertumbuhan hanya mencapai 2,93%. Surplus ini menunjukkan adanya ruang untuk optimalisasi belanja agar lebih efektif dalam mendukung pembangunan. Pemerintah juga mencatatkan peningkatan jumlah Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) menjadi 104 unit pada 2023, dengan dominasi di sektor layanan kesehatan, mencerminkan komitmen terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat.
b. Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK)
   Salah satu sorotan dalam laporan KFR adalah kinerja realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK), terutama di bidang pertanian yang mencatat realisasi terendah, hanya mencapai 39,23%. Hal ini disebabkan oleh rendahnya kinerja satuan kerja terkait, yang hanya merealisasikan 3,69% dari anggaran dengan capaian output 0,14%. Sebaliknya, DAK untuk bidang kesehatan dan keluarga berencana mencatat realisasi yang lebih baik, mencapai 73,86% dari total alokasi. Kinerja yang tidak merata ini menunjukkan perlunya perbaikan dalam perencanaan dan pelaksanaan program, khususnya pada sektor-sektor strategis yang berpotensi memberikan dampak signifikan bagi kesejahteraan masyarakat.
c. Strategi Pengurangan Pengangguran dan Peningkatan Produktivitas
   Pengangguran tetap menjadi salah satu isu utama di DKI Jakarta, meskipun tingkatnya telah menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan strategi komprehensif yang melibatkan peningkatan akses terhadap pendidikan, pelatihan kerja, dan penciptaan lapangan kerja baru.
   Selain itu, transformasi digital dan inovasi teknologi dapat menjadi kunci dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Pemerintah dapat mendorong kolaborasi antara sektor publik dan swasta untuk membangun ekosistem kerja yang adaptif terhadap perubahan global. Misalnya, program pelatihan berbasis teknologi atau pengembangan wirausaha digital dapat memberikan peluang baru bagi angkatan kerja. KFR 2023 menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan ekonomi dan fiskal tidak lepas dari sinergi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah pusat memainkan peran penting dalam menetapkan kerangka regulasi dan alokasi anggaran, sementara pemerintah daerah bertanggung jawab atas implementasi kebijakan di lapangan.

Kajian Fiskal Regional 2023 memberikan gambaran yang jelas tentang dinamika pembangunan di DKI Jakarta. Dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil, surplus fiskal, dan fokus pada pembangunan yang inklusif, Jakarta memiliki potensi besar untuk menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia. Namun, tantangan seperti ketimpangan ekonomi, pengangguran, dan rendahnya realisasi anggaran di sektor strategis memerlukan perhatian serius. Pemerintah perlu terus mendorong inovasi, investasi, dan kolaborasi lintas sektoral untuk menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan dan merata

SIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa transformasi Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional didorong oleh kebijakan infrastruktur, perkembangan industri, dan inovasi digital. Kebijakan transportasi massal seperti MRT dan LRT meningkatkan mobilitas dan investasi, sementara sektor jasa dan manufaktur mendukung kontribusi PDRB. Namun, tantangan kemacetan, urbanisasi, ketimpangan sosial, dan tekanan lingkungan memerlukan perhatian.

Pemerintah pusat dan daerah disarankan untuk memperkuat sinergi dalam kebijakan berkelanjutan, mengoptimalkan alokasi anggaran, dan meningkatkan akses pendidikan serta pelatihan tenaga kerja. Langkah ini bertujuan mengatasi dampak urbanisasi dan memperkuat ketahanan Jakarta sebagai kota berdaya saing global.

DAFTAR PUSTAKA

Amila, S., Nugraha, A. A., Sukron, A., & Rohmah, F. (2023). Analisis dampak dan resiko pemindahan ibu kota negara terhadap ekonomi di Indonesia. *Sahmiyya: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 10–18.

Anas, A. (2021). Transformasi bantuan sosial saat pembatasan sosial berskala besar dan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. *Monas: Jurnal Inovasi Aparatur*, 3(1), 264–265.

Aysa, I. R. (2021). Tantangan transformasi digital bagi kemajuan perekonomian Indonesia. *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah*, 3(2), 140–153.

Badan Pusat Statistik. (2023). *Produk domestik regional bruto DKI Jakarta tahun 2023*. Jakarta: BPS.

Budisusila, A. (2021). *Transformasi ekonomi Indonesia pasca pandemi Covid-19*. Sanata Dharma University Press.

Darmady, I. S. (2018). Studi transformasi-adaptasi ruang kota di kawasan pusat bisnis Karet Kuningan, Jakarta. *Jurnal Muara Sains, Teknologi, Kedokteran dan Ilmu Kesehatan*, 2(2), 464–477.

Halomoan, K. P. (2024). Transformasi Jakarta menjadi daerah khusus: Peta kebijakan dalam kerangka tujuan pembangunan berkelanjutan. *Jurnal Perkotaan*, 16(1), 46–64.

Jahar, A. S. (2015). Transformasi gerakan ekonomi Islam kontemporer. *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 39(2).

Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta. (2024). *Kajian fiskal regional (KFR) tahun 2023*. Jakarta.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. (2023). *Analisis kinerja dana alokasi khusus fisik tahun 2023*. Jakarta: Bappenas.

Koperasi, K. (2005). *Peran usaha mikro, kecil, dan menengah dalam pembangunan ekonomi nasional*. Jakarta: Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia.

KRL. (2023). *Sejarah KRL Commuterline Jabodetabek*. Diakses pada http://www.krl.co.id/ (01 Desember 2024).

Mahdi, I. (2017). Reklamasi Teluk Jakarta: Sebuah perspektif kekuasaan dalam ekonomi politik. *Jurnal Transformasi Global*, 4(1).

Nur, I., & Rakhman, M. T. (2019). Analisis PDRB sektor ekonomi unggulan provinsi DKI Jakarta. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 4(4), 351–370.

Panennungi, M. A. (2017). *Transformasi perekonomian Indonesia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Rustiadi, E., & Retno, D. (1999). Suburbanisasi kota Jakarta. *Disampaikan pada Seminar Nasional Tahun VII Persada Tahun 1999.*

Syamsi, A. B. (2017). Transformasi hukum ekonomi Islam sebagai *ius constituendum* menjadi *ius constitutum*. *Et-Tijarie: Jurnal Hukum dan Bisnis Syariah*, 4(1).

Syhabudin, A. (2012). Transformasi dan sinergi hukum Islam terhadap hukum nasional di Indonesia. *Al-Akhbar*, 1(1).

T. Garling, & L. Steg (Eds.). (2007). *Threats to the quality of urban life from car traffic: Problems, causes and solutions.*

Temple, G. P. (1974). *Migration to Jakarta: Empirical search for a theory*. (Disertasi Doktor, University of Wisconsin).